

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2025



KECAMATAN BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Limau Sundai, 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah SWT. Berkat rahmat dan karunianya, Kecamatan Batang Kapas telah menyelesaikan Rencana Kerja Tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2025, Renja ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2025 agar sesuai dengan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang ditetapkan agar lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Dengan telah disusunnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini diharapkan pelaksanaan teknis kegiatan pada Kantor Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dapat lebih terencana, terpola dan terpadu.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan saran-saran untuk kesempurnaan dikemudian hari, Kemudian kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen ini kami ucapkan terimakasih.

Limau Sundai, Juli 2024
CAMAT BATANG KAPAS

DENNY ANGGARA, SSTP., M.Ec.Dev
NIP. 19870101 200602 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
 BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	 8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Batang Kapas Tahun 2023	 8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Perangkat Daerah	18
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.	28
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	 30
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	30
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Batang Kapas	30
3.3 Program dan Kegiatan	33
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	 46
BAB V PENUTUP	54
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap daerah wajib menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, yang salah satunya berupa Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja adalah suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang akan di capai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan Potensi, Peluang dan Kendala yang ada dan/atau mungkin timbul dalam operasionalisasinya. Adanya Pelimpahan Kewenangan dari Bupati Kepada Camat sebagaimana telah ditetapkan dalam Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan meliputi 145 rincian kewenangan masih perlu dioptimalisasikan dalam pelaksanaannya terutama dalam operasionalisasinya di lapangan. Rencana kerja Kecamatan Batang Kapas tahun 2025 disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan strategis berbasis kinerja, dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah yang merupakan suatu proses pemikiran strategis yang tercermin dari:

1. Evaluasi kinerja pembangunan tahun lalu
2. Rumusan dan prioritas program dan kegiatan berbasis kinerja
3. Tolak ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan
4. Prakiraan maju pendanaan untuk tahun berikutnya
5. Pendekatan demokratis dan partisipatif diwujudkan melalui:
 - a. Transparatif dan akuntabilitas dalam perencanaan,
 - b. Kesetaraan antara pemangku kepentingan dari unsur Pemerintah dan non Pemerintah,

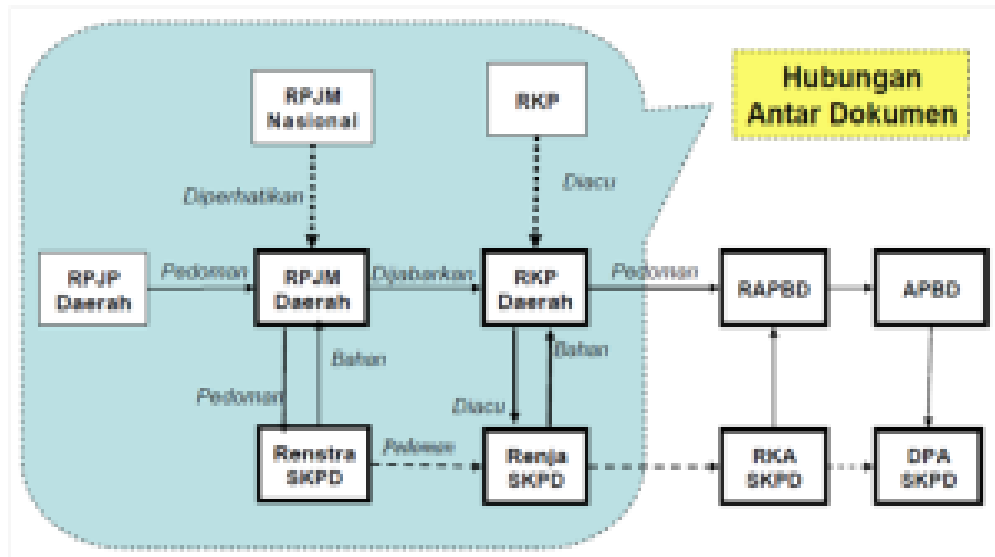
- c. Berperan aktif pada pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah dari segi penerapan perencanaan partisipatif.

Pendekatan Bottom-up, perencanaan dilaksanakan secara berjenjang dan diselenggarakan melalui musrenbang, konsisten terhadap visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta kesepakatan masyarakat tentang prioritas pembangunan dan hasil forum Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja ini disesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja ini memuat kerangka pendanaan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kecamatan maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Kecamatan Batang Kapas mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu, penyusunan rancangan Renja dapat dikerjakan secara simultan/ paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan.

Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan dari sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.1

Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kantor Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
 11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16SJ, tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 79);
 13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 117 tentang Rencana Strategis Kecamatan Batang Kapas Tahun 2021-2026;
 14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja OPD Kantor Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup Kecamatan Batang Kapas dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Adapun tujuan penyusunan Renja OPD Kantor Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah untuk :

1. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Camat Batang Kapas Tahun 2025;
2. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kantor Camat Batang Kapas Tahun 2025;
3. Menciptakan kepastian kebijakan sebagai bentuk komitmen Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) OPD Kantor Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan

- realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan sesuai dengan Standar Pelayanan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dengan peraturan pelaksanaan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan peraturan pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020. Jika indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- 2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, berisikan uraian mengenai : sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/ internasional, seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Sustainable Development Goals (SDGs), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal, menyampaikan tanggapan atas Rancangan Awal RKPD yang disusun oleh Bapedalitbang dan telah didiskusikan dalam Konsultasi Publik kaitannya dengan isu-isu strategis dalam rencana pembangunan tahun 2025 yang menjadi kewajiban kecamatan, sesuai dengan pelimpahan tugas dan tugas pokok dan fungsinya.

- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait dengan pelayanan di kecamatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Uraian berkaitan dengan harmonisasi dengan kebijakan Provinsi dan Nasional. Sehingga kegiatan pada Kecamatan Batang Kapas menunjang pencapaian visi-misi Bupati, program kegiatan provinsi dan nasional. Tujuan dan sasaran yang mana menjadi tugas perangkat daerah, merupakan bagian dari tujuan dan sasaran dalam visi misi Bupati, selanjutnya akan dirinci secara nyata dalam program/ kegiatan/ subkegiatan dengan indikator pengukuran, target kinerja yang jelas.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Setelah mencermati RKPD Kabupaten Pesisir Selatan 2025, Renstra Kecamatan Batang Kapas dan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026, maka akan tersusunlah daftar program/ kegiatan/ sub kegiatan Kecamatan Batang Kapas Tahun 2025. Rencana Kerja merupakan acuan setiap Perangkat Daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan Rencana Kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Batang Kapas Tahun 2023 dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Batang Kapas

Pada tahun 2023 Kecamatan Batang Kapas mempunyai 1 program, 4 kegiatan dan 14 sub kegiatan dengan jumlah anggaran awal sebesar Rp. 1.761.474.670,- dan setelah perubahan anggarannya menjadi Rp. 1.822.193.892,-, dan terealisasi sampai akhir tahun 2023 sebesar Rp.1.759.088.463,-. Dan di tahun 2023 ini semua program telah terlaksana dengan baik sesuai dengan yang direncanakan.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggung – jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima laporan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian (*assesment*) yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.



Tabel TC. 29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023
KECAMATAN BATANG KAPAS

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan(output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(n-2)			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
1								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan thn 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
001				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	2.283.000.000	1.791.182.015	1.955.840.515	1.791.182.015	91,58	1.761.474.670	315.671.042	17.92
001	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	18.000.000	3.584.500						
001	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.000.000	2.384.500						
001	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.000.000	1.200.000						
001	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN difasilitasi	1.914.000.000	1.563.163.099	1.449.833.899	1.395.914.142	96,54	1.474.914.677	271.794.802	18.42
001	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.850.000.000	1.499.163.099	1.425.193.899	1.371.247.142	96,22	1.439.474.677	267.854.802	18.60



Kantor Camat Batang Kapas

001	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	64.000.000	64.000.000	26.640.000	26.640.000	100	35.440.000	3.940.000	11.11
001	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang difasilitasi	174.000.000	120.729.300	236.613.870	230.157.593	97,27	153.804.960	25.298.570	16.44
001	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3.500.000	1.908.000	6.514.146	6.462.000	99,20	2.713.173	225.000	8.29
001	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20.000.000	27.890.000	10.000.000	9.963.951	99,64	7.216.776		
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	15.000.000							
001	2	06	04	Penyediaan Bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	21.000.000	17.535.300	24.587.745	24.581.820	99,98	23.794.761	3.811.570	16.01
001	2	06	05	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10.000.000	6.633.000	11.738.179	11.695.750	99,64	7.585.250	233.000	3.07
001	2	06	06	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang - undangan.	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4.500.000	3.240.000	3.600.000	3.360.000	93,33	3.600.000	450.000	12.5
001	2	06	08	Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	14.413.000	37.853.600	37.849.400	99,99	7.700.000		
001	2	06	09	Penyelenggaraan rapat koord.dan konsultasi SKPD.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.000.000	49.110.000	142.320.200	136.244.672	95,73	101.195.000	20.579.000	20.33
001	2	08		Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	78.000.000	20.878.316	77.662.050	76.406.753	99,35	76.905.010	12.477.670	16.22
001	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	20.000.000	6.783.316	10.800.000	9.931.124	91,95	12.412.000	2.477.670	19.96
001	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	58.000.000	14.095.000	66.862.050	66.475.629	99,42	64.493.010	10.000.000	15.50



Kantor Camat Batang Kapas

					Kantor yang Disediakan								
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		25.000.000							
				Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang dibeli								
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dibeli	25.000.000							
001	2	09		Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	jumlah BMD yang dipelihara	74.000.000	82.826.800	58.084.073	56.609.975	97,46	55.850.023	6.100.000	10.92
001	2	09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan.	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	50.000.000	20.662.800	26.900.073	26.030.975	96,77	38.900.023	4.960.000	12.75
001	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4.000.000	2.710.000	6.400.000	6.050.000	97,58	3.350.000	340.000	10.14
001	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20.000.000	7.454.000	24.984.000	24.529.000	98,18	13.600.000	800.000	5.88
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi								
002				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan kecamatan	85.000.000	75.689.000						
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		15.000.000	27.032.000						
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan		15.000.000	27.032.000						



Kantor Camat Batang Kapas

				kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan									
002	2	04		Pelaksanaan urusan pemerintahan yg dilimpahkan kepada Camat.	Jumlah izin yang direkomendasikan	70.000.000	48.657.000						
002	2	04	01	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yg terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	5.000.000	700.000						
002	2	04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	5.000.000							
002	2	04	03	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yg terkait dengan Kewenangan Lain yg dilimpahkan	jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	60.000.000	47.957.000						
003				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat yang menjadi prioritas kecamatan	20.000.000	6.643.000						
003	2	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.	Jumlah kegiatan pemberdayaan desa	20.000.000	6.643.000						
003	2	01	01	Peningkatan Partisipasi Masy. Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.	jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	20.000.000	6.643.000						
003	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masy. di Wilayah Kecamatan.	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
004				PROGRAM KOORDINASI KENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	12.000.000	3.609.000						
004	2	01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan	Jumlah kasus yang diselesaikan	12.000.000	3.609.000						



Kantor Camat Batang Kapas

				ketertiban Umum.									
004	2	01	01	Sinegritas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia ,tentara nasioanl Ind.dan Instansi Vertikal di Wilayah Kec.	jumlah laporan hasil Sinegritas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia ,tentara nasioanl Ind.dan Instansi Vertikal di Wilayah Kec.	6.000.000	3.609.000						
004	2	01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6.000.000							
005				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penugasan terkait pemerintahan umum yang dilaksanakan	26.000.000	17.726.500						
005	2	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala Daerah	Jumlah Kegiatan difasilitasi	26.000.000	17.726.500						
005	2	1	03	Pembinaan Persatuan dan kesatuan bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	20.000.000	12.166.500						
005	2	1	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koord. Pimpinan di Kecamatan.	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6.000.000							
				Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah Nagari yang melaksanakan Pilwana		5.560.000						
006				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMRINTAHAN DESA	Jumlah nagari lingkup kecamatan yang memiliki pengelolaan keuangan dan administrasi yang baik	12.000.000	27.876.700						
006	2	01		Fasilitasi,Rekomendasi dan koord.Pimpinan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.	Jumlah Nagari fasilitasi	12.000.000	27.876.700						
006	2	01	02	Fasilitasi Adminitrasi Tata Pemerintahan Desa.	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	12.000.000	9.085.000						



Kantor Camat Batang Kapas

					Administrasi Tata Pemerintahan Desa								
				Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di wilayah Kecamatan	Jumlah Nagari yang difasilitasi dalam pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan		18.791.700						
				Jumlah		2.438.000.000	1.922.726.215	1.822.193.892	1.759.088.463	96,54	1.761.474.670	315.671.042	17.92

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Batang Kapas berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan. Kinerja Pelayanan di OPD Kantor Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja:

1. Nilai IKM Kecamatan (PATEN)
2. Persentase pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu
3. Persentase keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
4. Nilai SAKIP Kecamatan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, OPD Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

1. Kinerja pelayanan di bidang Pemerintahan

1. Pelayanan teknis administrasi baik kedalam maupun keluar.
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat.
3. Peningkatan dan perwujudan ketentraman dan ketertiban.
4. Pelayanan kepada pemerintahan desa dan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan.
5. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada dinas/instansi yang berada di wilayah Kecamatan Batang Kapas maupun pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Memberikan pembinaan kepada penambangan galian C dan peningkatan PBB.
7. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan dinas instansi terkait di tingkat Nagari, Kecamatan dan Kabupaten.

2. Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan

1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan dengan memfasilitasi, membina, dan memantau kegiatan peningkatan

infrastruktur yang berbasis masyarakat (Kemitraan, swadaya murni, UPK, dan lain-lain)

2. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan, dan peternakan.
3. Fasilitas Pemberdayaan masyarakat pinggir kawasan hutan
4. Fasilitas peningkatan produk unggulan Nagari
5. Melaksanakan musrenbang kecamatan dan memfasilitasi musrenbang nagari.
6. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta kesehatan.
7. Pembinaan kelompok simpan pinjam dan Program UPK.

3. Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan

1. Monitoring penyaluran Bantuan Langsung Tunai dari Nagari
2. Memfasilitasi pembangunan tempat-tempat ibadah
3. Pelaksanaan Peringatan hari-hari besar Keagamaan
4. Pelaksanaan Peringatan hari Bakti Transmigrasi
5. Monitoring penyaluran Jamkesmas dan Jamkesda
6. Membantu penanganan masalah sosial dan bencana alam
7. Pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait dengan kegiatan olahraga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana

Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut:



Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Batang Kapas
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n- 2)	Tahun 2024 (thn n- 1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n- 2)	Tahun 2024 (thn n- 1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	-	-	80%	80%	85%	90%	80%	-	80%		Realisasi 2023 dan proyeksi 2025-2026 memakai angka target
2	Jumlah nagari yang menerapkan tata kelola Keuangan dan pemerintahan yang baik	-	-	9	9	9	9	9	-	9		Realisasi 2023 dan proyeksi 2025-2026 memakai angka target
3	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	-	BB	BB	BB	A	A	-	A		Realisasi 2023 dan proyeksi 2025-2026 memakai angka target

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Kecamatan Batang Kapas menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Terdapat beberapa isu strategis yang perlu diantisipasi oleh Perangkat Daerah Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

2.3.1. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah :

a. Kecamatan

Permasalahan secara umum yang terdapat di Kecamatan Batang Kapas dalam melaksanakan tupoksinya adalah masih lemahnya atau belum optimalnya pola Koordinasi fasilitasi, Motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Kesejahteraan Masyarakat, yang disebabkan :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia yang belum memadai;
2. Etos kerja yang belum terbina secara optimal;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan;
4. Belum tertib dan lemahnya sistem administrasi Perkantoran;
5. Perencanaan program dan kegiatan yang belum tepat sasaran sehingga belum terwujudnya pemerintahan yang good governance

Permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Batang Kapas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Seksi Pemerintahan

a. Permasalahan Urusan Kependudukan :

- 1) Masih banyak penduduk wajib kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang belum terdata dengan baik
- 2) Masih banyak penduduk yang masa berlaku kartu tanda penduduknya telah habis
- 3) Masih tinggi prosentase penduduk yang tidak memiliki akte lahir.

Adapun upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan.

b. Permasalahan Peraturan Nagari :

- 1) Masih rendahnya kepedulian Nagari dalam merumuskan dan membuat peraturan Nagari sebagai payung hukum bagi nagai dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan.

Upaya yang dilakukan adalah memberikan sosialisasi kepada pemerintahan Nagari tentang pedoman pembuatan peraturan Nagari.

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan

a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan di Kecamatan Batang Kapas pada umumnya berjalan baik, tetapi di bidang perkoperasian perlu peningkatan pemahaman tentang administrasi.

Upaya yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi tentang Pemberdayaan Masyarakat dan kelembagaan sehingga memaksimalkan kegiatan mengenai Pemberdayaan Masyarakat dan kelembagaan tersebut.

3. Seksi Kesejahteraan Sosial

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi warga dan lingkungan
- b. Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Keluarga masih dirasa kurang
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi ikut serta mensukseskan pembangunan yang ada di wilayah mereka.

Upaya yang dilakukan adalah:

1. Meningkatkan peran Institusi masyarakat dan meningkatkan penyuluhan oleh kesehatan dan dinas Sektorat tentang pentingnya menjaga kesehatan serta memanfaatkan momentum kegiatan-kegiatan dalam penyuluhan secara langsung, berkala dan terpadu utamanya kegiatan Posyandu serta memanfaatkan momentum dalam memecahkan masalah.
2. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam peningkatan kesempatan kerjasama dengan Wali Nagari untuk memaksimalkan peran kader dan institusi Masyarakat dalam peningkatan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya memaksimalkan pencapaiantarget Keluarga Berencana.

4. Seksi Trantib

Permasalahan di pada urusan ketentraman dan ketertiban :

- 1) Masih perlu ditingkatkannya kesadaran Masyarakat bahwa keamanan lingkungan adalah tanggungjawab bersama;
- 2) Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap antisipasi bencana di masing-masing lingkungan;
- 3) Kurangnya kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha;

Upaya yang telah dilakukan adalah:

1. Mengadakan Sosialisasi secara berkala berkaitan dengan Ketentraman Ketertiban dan Keamanan Wilayah;
2. Meningkatkan kesadaran hukum tentang hak dan Kewajiban yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha;

5. Seksi pelayanan

Permasalahan pada seksi pelayanan:

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat akan tata cara melakukan pelayanan di kantor camat.

Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi akan tata cara melaksanakan pelayanan di kantor camat serta memasang

spanduk ataupun poster petunjuk tentang tata cara melaksanakan pelayanan di Kantor Camat Batang Kapas

Upaya yang dilakukan adalah:

- a. Meningkatkan peran Institusi masyarakat dan meningkatkan penyuluhan oleh kesehatan dan dinas Sektoral tentang pentingnya menjaga kesehatan serta memanfaatkan momentum kegiatan-kegiatan dalam penyuluhan secara langsung, berkala dan terpadu utamanya kegiatan Posyandu serta memanfaatkan momentum dalam memecahkan masalah.
- b. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam peningkatan kesempatan kerjasama dengan Wali Nagari untuk memaksimalkan peran kader dan institusi Masyarakat dalam peningkatan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya memaksimalkan pencapaian target Keluarga Berencana.

2.3.2. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Batang Kapas

Tantangan

1. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas Pemerintahan.
2. Belum optimalnya koordinasi dengan dan antar Dinas Teknis terkait.
3. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah.

Peluang

1. Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah serta pelayanan publik.
2. Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan tupoksi Kecamatan.
3. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Batang Kapas Tahun 2025 terhadap kebutuhan yang dapat dilihat pada Tabel T-C.31. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.



Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Pesisir Selatan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Batang Kapas

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Batang Kapas			1.642.839.062	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Batang Kapas			1.642.839.062	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Batang Kapas			6.305.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Batang Kapas			6.305.000	
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kecamatan Batang Kapas	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun	2 dokumen	3.010.000	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kecamatan Batang Kapas	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun	2 dokumen	3.010.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Batang Kapas	Jumlah dokumen evaluasi triwulanan	6 dokumen	3.295.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Batang Kapas	Jumlah dokumen evaluasi triwulanan	6 dokumen	3.295.000	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Batang Kapas			1.826.601.475	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Batang Kapas			1.826.601.475	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Batang Kapas	Jumlah bulan gaji ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	12 bulan	1.772.001.475	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Batang Kapas	Jumlah bulan gaji ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	12 bulan	1.772.001.475	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Batang Kapas	Jumlah bulan pembayaran honor ASN dan Non ASN yang dibayarkan	12 bulan	54.600.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Batang Kapas	Jumlah bulan pembayaran honor ASN dan Non ASN yang dibayarkan	12 bulan	54.600.000	



Kantor Camat Batang Kapas

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Batang Kapas			104.938.372	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Batang Kapas			104.938.372	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Batang Kapas	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Bulan	1.910.480	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Batang Kapas	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Bulan	1.910.480	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Batang Kapas	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	5.500.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Batang Kapas	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	5.500.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Batang Kapas	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	18.092.872	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Batang Kapas	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	18.982.872	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Batang Kapas	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	6.605.020	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Batang Kapas	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	6.605.020	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Batang Kapas	Jumlah Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 buah	3.600.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Batang Kapas	Jumlah Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 buah	3.600.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Batang Kapas	Jumlah bulan pelayanan tamu	12 buah	19.950.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Batang Kapas	Jumlah bulan pelayanan tamu	12 buah	19.950.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Batang Kapas	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	12 dokumen	54.780.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Batang Kapas	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	12 dokumen	54.780.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Batang Kapas			25.826.880	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Batang Kapas			25.826.880	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Batang Kapas	jumlah tagihan Listrik (PLN) yang di bayarkan (KVA/bulan)	12 bulan	11.571.340	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Batang Kapas	jumlah tagihan Listrik (PLN) yang di bayarkan (KVA/bulan)	12 bulan	11.571.340	



Kantor Camat Batang Kapas

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Batang Kapas	Ketersediaan jasa kebersihan kantor/Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	1 orang	14.255.540	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Batang Kapas	Ketersediaan jasa kebersihan kantor/Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	1 orang	14.255.540	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Batang Kapas			102.423.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Batang Kapas			102.423.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Batang Kapas	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Opeasional/Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	3 unit	43.150.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Batang Kapas	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Opeasional/Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	3 unit	43.150.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Batang Kapas	Terpeliharanya peralatan Kantor/Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 paket	2.800.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Batang Kapas	Terpeliharanya peralatan Kantor/Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 paket	2.800.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Batang Kapas	Jumlah gedung dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	3 unit	4.473.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Batang Kapas	Jumlah gedung dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	1 unit	4.473.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Batang Kapas	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang diperlihara/ direhab	1 unit	52.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Batang Kapas	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang diperlihara/ direhab	1 unit	52.000.000	
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Batang Kapas			35.049.860	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Batang Kapas			35.049.860	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Batang Kapas			31.722.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Batang Kapas			31.722.000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kecamatan Batang Kapas			31.722.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kecamatan Batang Kapas			31.722.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Batang Kapas			3.327.860	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Batang Kapas			3.327.860	



Kantor Camat Batang Kapas

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Batang Kapas	Jumlah rekomendasi perizinan yang difasilitasi	50 rekomendasi	2.017.500	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Batang Kapas	Jumlah rekomendasi perizinan yang difasilitasi		2.017.500	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Batang Kapas	jumlah rekomendsi non perizinan yang diterbitkan	150 rekomendasi	1.310.360	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Batang Kapas	jumlah rekomendsi non perizinan yang diterbitkan	30 rekomendasi	1.310.360	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Batang Kapas	Jumlah kunjungan safari ramadhan ke nagari	10 kali	1.512.500	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Batang Kapas	Jumlah kunjungan safari ramadhan ke nagari	10 kali	1.512.500	
			Jumlah Lembaga Didikan subuh yang dikunjungi	10 LDS				Jumlah Lembaga Didikan subuh yang dikunjungi	10 LDS		
			Jumlah MTQ yang diikuti	1 kali				Jumlah MTQ yang diikuti	1 kali		
			Jumlah sosialisasi dan penanganan covid 19	500 kali				Jumlah sosialisasi dan penanganan covid 19	500 kali		
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Batang Kapas			9.493.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Batang Kapas			9.493.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Batang Kapas			9.493.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Batang Kapas			9.493.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Batang Kapas	Jumlah usulan program kegiatan pada musrenbang kecamatan sesuai dengan prioritas	50 usulan	9.493.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Batang Kapas	Jumlah usulan program kegiatan pada musrenbang kecamatan sesuai dengan prioritas	50 usulan	9.493.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Batang Kapas	Jumlah lembaga sosial ekonomi masyarakat yang difasilitasi/dibina	10 lembaga	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Batang Kapas	Jumlah lembaga sosial ekonomi masyarakat yang difasilitasi/dibina	10 lembaga	0	
			Jumlah produk unggulan yang dibina	3 Produk				Jumlah produk unggulan yang dibina	3 Produk		



Kantor Camat Batang Kapas

4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Batang Kapas			24.918.500	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Batang Kapas			24.918.500	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Batang Kapas			24.918.500	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Batang Kapas			24.918.500	
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Batang Kapas	Jumlah pelaksanaan PHBN	1 kali	19.108.500	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Batang Kapas	Jumlah pelaksanaan PHBN	1 kali	19.108.500	
	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Kecamatan Batang Kapas	Jumlah pelaksanaan Pilwana yang dilaksanakan	1 kali	5.810.000	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Kecamatan Batang Kapas	Jumlah pelaksanaan Pilwana yang dilaksanakan	1 kali	5.810.000	
5.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Batang Kapas			7.020.000	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kecamatan Batang Kapas			7.020.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Batang Kapas			5.480.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Batang Kapas			5.480.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Kecamatan Batang Kapas			5.480.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Kecamatan Batang Kapas			5.480.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Batang Kapas			1.540.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Batang Kapas			1.540.000	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Batang Kapas			1.540.000					1.540.000	
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kecamatan Batang Kapas			16.030.000	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kecamatan Batang Kapas			16.030.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Batang Kapas			16.030.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Batang Kapas			16.030.000	



Kantor Camat Batang Kapas

	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Batang Kapas	Jumlah pengelolaan keuangan dan pemerintahan nagari yang baik	9 Nagari	9.325.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Batang Kapas	Jumlah pengelolaan keuangan dan pemerintahan nagari yang baik	9 Nagari	9.325.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di wilayah Kecamatan	Kecamatan Batang Kapas	Jumlah fasilitasi dan koordinasi pembangunan kawasan kota terpadu mandiri	1 kali	6.705.000	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kecamatan Batang Kapas	Jumlah fasilitasi dan koordinasi pembangunan kawasan kota terpadu mandiri	1 kali	6.705.000	
			Jumlah Fasilitasi dan koordinasi pembangunan kawasan perdesaan berbasis pariwisata	10 kawasan				Jumlah Fasilitasi dan koordinasi pembangunan kawasan perdesaan berbasis peternakan terintegrasi dengan perkebunan sawit	10 kawasan		
			Jumlah nagari yang difasilitasi dalam pembangunan kawasan perhutanan sosial	2 nagari				Jumlah nagari yang difasilitasi dalam pembangunan kawasan perhutanan sosial	2 nagari		
	Jumlah				2.165.618.587	Jumlah				2.165.618.587	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada tahun 2025 tidak terdapat Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan



Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Pesisir Selatan

Nama Perangkat Daerah : Kantor Camat Batang Kapas

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
N I H I L					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional. Khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun SDG's. Kebijakan nasional yang diampu oleh Kecamatan Batang Kapas lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

Sehubungan dengan pelaksanaan Nawacita dimana pelaksanaan pembangunan dari pinggir Kecamatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah Desa/Nagari sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam mewujudkan pembangunan Desa/Nagari, tujuan/indikator yang bisa ditetapkan Kecamatan Batang Kapas adalah:

1. Mengoptimalkan fungsi fasilitasi Pembinaan produk unggul nagari dan pemberdayaan masyarakat
2. Koordinasi penetapan rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh (pembangunan kawasan pariwisata seperti Pantai Tansridano, Pantai Labuang Baruak).

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah Kantor Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 mengacu pada visi dan misi Rencana Startegis (Renstra) Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan serta selaras dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan merupakan lanjutan dari periode pembangunan lima tahun sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026. Visi Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026 adalah:

“MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL”

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Pesisir Selatan, maka dijabarkan kedalam misi sebagai berikut:

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

Misi pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan yang sesuai dengan urusan Kewilayahan/Kecamatan adalah misi kesatu yakni **“Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.”**

3. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 maka tujuan yang hendak dicapai yaitu:

“Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi.”**4. Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dengan indikator outcome yang terukur. Dalam perumusan Sasaran, harus benar-benar diperhatikan keterukuran dari indikator kinerja Sasaran yang akan diukur. Sasaran yang hendak dicapai dalam peningkatan pelayanan publik tahun 2024 yaitu:

- a. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja
- b. Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Th. 2025
1.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	A
			Jumlah nagari yang menerapkan tata kelola keuangan dan pemerintahan yang baik	9 Nagari
		Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	90%

3.3. Program Dan Kegiatan

Bahan pertimbangan terhadap rumusan Rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dalam Renja 2025 ini adalah seperti yang telah tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 yang berfokus pada pencapaian visi dan misi Bupati Pesisir Selatan.

Rekapitulasi rencana program dan kegiatan tahun 2025:

Jumlah Program : 6 (enam)

Jumlah Kegiatan : 11 (sebelas)

Jumlah Sub Kegiatan : 28 (dua puluh delapan)

Pagu Indikatif APBD: Rp 2.299.221.398,- (*Dua milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah*).

Rencana Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Merupakan program untuk menunjang pelaksanaan pelayanan perkantoran , dilaksanakan dengan beberapa kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

A. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Merupakan kegiatan yang berisikan tentang penyusunan dokumen Renstra dan Renja Kecamatan serta Dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan kantor, dengan sub kegiatan terdiri dari :

a. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah

Merupakan sub kegiatan untuk Menyusun Dokumen Renstra, dan Renja Kecamatan Batang Kapas.

b. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah

Merupakan sub kegiatan untuk menyusun Dokumen Evaluasi dan pelaporan seperti evaluasi RKPD, LPPD dan sebagainya.

B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Merupakan kegiatan yang berisikan tentang Anggaran Keuangan Kantor, dengan sub kegiatan yaitu :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Merupakan sub kegiatan khusus untuk pembayaran gaji pegawai negeri sipil di lingkungan kantor..

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Merupakan sub kegiatan yang berisikan pembayaran honor pengelola keuangan kantor.

C. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Merupakan kegiatan yang berisikan pelayanan dasar perkantoran yang terdiri dari beberapa sub kegiatan seperti :

a. Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Merupakan sub kegiatan untuk memenuhi kebutuhan akan komponen listrik guna penerangan bangunan kantor seperti Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar dan battery kering).

b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Merupakan sub kegiatan untuk memenuhi kebutuhan akan Alat Tulis Kantor, Terdiri dari:

- Belanja Alat Tulis Kantor
- Belanja Materai dan benda pos lainnya

c. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Merupakan sub kegiatan untuk memenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor.

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Merupakan sub kegiatan untuk memenuhi akan kebutuhan barang cetakan dan pengadaan kantor, terdiri dari:

- Belanja Cetak
- Belanja pengadaan

e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perUndang-Undangan

Merupakan sub kegiatan untuk memenuhi kebutuhan akan bahan bacaan pada kantor, terdiri dari:

- Belanja surat kabar /majalah
- Belanja publikasi/pariwara

f. Fasilitas Kunjungan Tamu

Merupakan sub kegiatan untuk memenuhi kebutuhan tamu yang datang ke kantor camat yang terdiri dari:

- Belanja makanan dan minuman tamu

g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD

Merupakan sub kegiatan untuk memenuhi kebutuhan Operasional Untuk Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah dan memenuhi kebutuhan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah serta rapat-rapat yang bersifat rutin yang diselenggarakan oleh kecamatan.

D. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Merupakan kegiatan yang berisikan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor serta honorarium tenaga harian lepas dengan sub kegiatannya seperti berikut :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Merupakan sub kegiatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik untuk kantor. Kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik bermanfaat dalam penyediaan kebutuhan komunikasi, air dan listrik kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran.

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Merupakan sub kegiatan untuk memenuhi kebutuhan akan jasa pelayanan umum kantor yang terdiri dari:

- Belanja Honorarium pegawai Honorer/tidak tetap
- Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

E. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Merupakan kegiatan mengenai pemeliharaan barang milik daerah yang meliputi pemeliharaan kendaraan dinas, kendaraan operasional, rumah dinas, kantor camat, peralatan dan mesin serta sarana dan prasarana kantor yang sub kegiatannya sebagai berikut :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Merupakan sub kegiatan yang berisikan pemeliharaan rutin dan jasa pemeliharaan kendaraan dinas jabatan serta penyediaan pembayaran pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan.

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

Merupakan sub kegiatan untuk pemeliharaan peralatan dan mesin pada SKPD secara berkala yang terdiri dari:

- Belanja jasa servis AC, Komputer PC atau Laptop dan Printer
- Belanja penggantian suku cadang AC, Komputer PC atau Laptop dan Printer.

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Merupakan sub kegiatan untuk kebutuhan memenuhi secara berkala Gedung kantor dengan ketersediaan, terdiri dari:

- Belanja bahan baku bangunan
- Belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- Belanja jasa pihak ketiga

d. Pemeliharaan/ rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Merupakan sub kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Merupakan program yang bertujuan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terdiri dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan seperti :

A. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Merupakan kegiatan pelimpahan wewenang pemerintah daerah kepada camat yang terdiri dari beberapa sub kegiatan seperti :

a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

Merupakan sub kegiatan yang bertujuan memenuhi pelayanan perizinan non usaha kepada masyarakat dengan mengeluarkan sebuah rekomendasi yang terkait dengan perizinan non usaha seperti ijin mendirikan bangunan.

b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Non Perizinan

Merupakan sub kegiatan yang bertujuan memenuhi pelayanan Nonperizinan kepada masyarakat dengan mengeluarkan sebuah rekomendasi seperti ijin menikah.

c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan lain yang Dilimpahkan

Merupakan sub kegiatan yang berisikan tentang aktivitas keagamaan seperti Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan, Pelaksanaan Safari Ramadhan, fasilitasi pembinaan didikan subuh, fasilitasi pembentukan remaja mesjid, fasilitasi penyelenggaraan subuh berjamaah di musholla/mesjid, Tracking Keluarga Pasien Positif Covid-19 di Kecamatan Batang Kapas, dll.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di nagari untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :

A. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:

a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Merupakan sub kegiatan yang bertujuan meningkatkan minat masyarakat dan partisipasinya dalam forum perencanaan pembangunan nagari melalui musrenbang nagari dan kecamatan.

b. Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Merupakan sub kegiatan yang bertujuan untuk memfasilitasi dan membina lembaga-lembaga yang ada di kecamatan maupun tingkat

nagari seperti Pembinaan kepada TP-PKK kecamatan maupun TP-PKK Nagari serta pemberdayaan kelompok Produk Unggulan Nagari maupun Kecamatan yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Merupakan program yang berisikan kegiatan yang bersifat umum dimana terdiri dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan seperti :

A. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Merupakan kegiatan yang dilimpahkan oleh kepala daerah kepada camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, yang terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :

a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Merupakan sub kegiatan yang berisikan tentang persatuan dan kesatuan bangsa melalui pelaksanaan upacara hari besar nasional seperti upacara 17 Agustus, peringatan hari pahlawan, dsb.

b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

merupakan sub kegiatan yang memfasilitasi forum pimpinan di kecamatan dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang ada di nagari.

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Merupakan program yang bertujuan untuk membina dan melakukan pengawasan terhadap pemerintahan nagari yang terdiri dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan seperti :

A. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Merupakan Kegiatan yang memberikan fasilitasi kepada masyarakat serta memberikan rekomendasi dan melaksanakan koordinasi pembinaan terhadap masyarakat maupun nagari yang terdiri dari :

a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Merupakan sub kegiatan yang memfasilitasi pembinaan terhadap perangkat nagari dalam pelaksanaan tata pemerintah dan pengelolaan keuangan nagari yang baik.

b. Fasilitas Penetapan Pembangunan Kawasan Pedesaan

Merupakan sub kegiatan yang memfasilitasi dalam hal pembangunan kawasan perhutanan sosial dan pembangunan kawasan kota terpadu mandiri.

Uraian rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel T-C.33 berikut ini:



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026**

Unit Organisasi : Kecamatan Batang Kapas

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								2.591.441.475				2.531.441.475	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.274.441.475				2.274.441.475	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								35.000.000				35.000.000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun		Kec. Batang Kapas, Kab. Pesisir Selatan		2 dokumen		20.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			2 dokumen	20.000.000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen evaluasi triwulanan		Kec. Batang Kapas, Kab. Pesisir Selatan		6 dokumen		15.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			6 dokumen	15.000.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1.803.441.475				1.803.441.475	



Kantor Camat Batang Kapas

7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah bulan gaji ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya		Kec. Batang Kapas, Kab. Pesisir Selatan		12 bulan		1.758.441.475	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	1.758.441.475
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah bulan pembayaran honor ASN dan Non ASN yang dibayarkan		Kec. Batang Kapas, Kab. Pesisir Selatan		12 bulan		45.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	45.600.000
7	01	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah								288.000.000				288.000.000
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor		Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		Kec. Batang Kapas, Kab. Pesisir Selatan		12 Bulan		13.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	13.000.000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan		Kec. Batang Kapas, Kab. Pesisir Selatan		12 Paket		36.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12 Paket	36.000.000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		Kec. Batang Kapas, Kab. Pesisir Selatan		12 paket		15.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12 paket	15.000.000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Bahan bacaan dan Peraturan-undangan yang disediakan		Kec. Batang Kapas, Kab. Pesisir Selatan		12 buah		12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 buah	12.000.000



Kantor Camat Batang Kapas

7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah bulan pelayanan tamu		Kec. Batang Kapas, Kab. Pesisir Selatan		12 bulan		40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 bulan	40.000.000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi		Kec. Batang Kapas, Kab. Pesisir Selatan		12 dokumen		170.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 dokumen	170.000.000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								70.000.000				70.000.000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		jumlah tagihan Listrik (PLN) yang dibayarkan (KVA/bulan)		Kec. Batang Kapas, Kab. Pesisir Selatan		12 bulan		10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			12 bulan	10.000.000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Ketersediaan jasa kebersihan kantorJumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia		Kec. Batang Kapas, Kab. Pesisir Selatan		7 orang		60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7 orang	60.000.000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								78.000.000				78.000.000	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Terpeliharanya Kendaraan Dinas Jabatan		Kec. Batang Kapas, Kab. Pesisir Selatan		1 unit		30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 unit	30.000.000



Kantor Camat Batang Kapas

7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan		Terpeliharanya Kendaraan Dinas Opeasional/Lapangan		Kec. Batang Kapas, Kab. Pesisir Selatan		2 unit		10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 unit	10.000.000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terpeliharanya peralatan KantorJumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kec. Batang Kapas, Kab. Pesisir Selatan		12 paket		12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 paket	12.000.000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab		Kec. Batang Kapas, Kab. Pesisir Selatan		2 unit		20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 unit	20.000.000
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab		Kec. Batang Kapas, Kab. Pesisir Selatan		3 unit		6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 unit	6.000.000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							74.000.000					79.000.000
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							74.000.000					79.000.000
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Perizinan		jumlah permohonan yang difasilitasi		Kec. Batang Kapas, Kab. Pesisir Selatan		50 rekomendasi		2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 rekomendasi	2.000.000



Kantor Camat Batang Kapas

7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah permohonan non perizinan yang difasilitasi		Kec. Batang Kapas, Kab. Pesisir Selatan		50 rekomendasi		2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50 rekomen dasi	2.000.000
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah MTQ yang diikuti Jumlah kunjungan safari ramadhan ke nagari		Kec. Batang Kapas, Kab. Pesisir Selatan		2 kali 10 kali 500 kali		55.000.000 15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2 kali 10 kali 500 kali	55.000.000 20.000.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								90.000.000	100.000.000				
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								90.000.000	100.000.000				
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah usulan program kegiatan pada musrenbang kecamatan sesuai dengan prioritas		Kec. Batang Kapas, Kab. Pesisir Selatan		50 usulan		20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50 usulan	20.000.000
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah lembaga sosial ekonomi masyarakat yang difasilitasi/dibina Jumlah produk unggulan yang dibina		Kec. Batang Kapas, Kab. Pesisir Selatan		9 nagari 3 kelompok		40.000.000 30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9 nagari 3 kelompok k	40.000.000 40.000.000



Kantor Camat Batang Kapas

7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								58.000.000					58.000.000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								58.000.000					58.000.000
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		Jumlah pelaksanaan PHBN		Kec. Batang Kapas, Kab. Pesisir Selatan		38.000.000		38.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				50.000.000
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan		Kec. Batang Kapas, Kab. Pesisir Selatan		20.000.000		20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				8/000.000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								15.000.000					20.000.000
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								15.000.000					20.000.000
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah pengelolaan keuangan dan pemerintahan nagari yang baik		Kec. Batang Kapas, Kab. Pesisir Selatan		9 nagari		15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9 nagari	20.000.000
TOTAL													2.511.441.475					2.531.441.475

BAB IV

RENCANA KERJA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Batang Kapas. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Kecamatan Batang Kapas ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Kecamatan Batang Kapas. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Batang Kapas.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:



**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Progran (Out come dan Kegiatan Output)	Data Pencapaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
							Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	20	21
Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penugasan terkait pemerintahn umum yang dilaksanakan			2.069.221.398	Kec. Batang Kapas	
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.000.000	Kec. Batang Kapas	
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja yang disusun		4 dok	5.000.000	Kec. Batang Kapas	
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi triwulanan		17 dok	5.000.000	Kec. Batang Kapas	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.700.000.000	Kec. Batang Kapas	



						Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tunjangan ASN Jumlah bulan gaji ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	12 bulan	1.650.000.000	Kec. Batang Kapas	
						Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan pembayaran honor ASN dan Non ASN yang dibayarkan	12 bulan	50.000.000	Kec. Batang Kapas	
						Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			208.221.398	Kec. Batang Kapas	
						Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 bulan	6.000.000	Kec. Batang Kapas	
						Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	20.000.000	Kec. Batang Kapas	
						Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 paket	15.000.000	Kec. Batang Kapas	
						Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 paket	25.000.000	Kec. Batang Kapas	
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	24.621.398	Kec. Batang Kapas	
						Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	8.000.000	Kec. Batang Kapas	



Kantor Camat Batang Kapas

						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan dan Perundang-undangan yang disediakan		12 buah	3.600.000	Kec. Batang Kapas	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan pelayanan tamu		12 buah	12.000.000	Kec. Batang Kapas	
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi		12 dokumen	90.000.000	Kec. Batang Kapas	
						Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				77.000.000	Kec. Batang Kapas	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah tagihan Listrik (PLN) yang dibayarkan (KVA/bulan)		12 bulan	12.000.000	Kec. Batang Kapas	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ketersediaan jasa kebersihan kantorJumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia		7 orang	65.000.000	Kec. Batang Kapas	
						Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				74.000.000	Kec. Batang Kapas	



						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas OpeasionalJumlah kendaraan dinas yang dipelihara		3 unit	50.000.000	Kec. Batang Kapas	
						Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan KantorJumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		12 paket	4.000.000	Kec. Batang Kapas	
						Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dan bangunan lainnya yang dipelihara/ rehab		3 unit	20.000.000	Kec. Batang Kapas	
		Jumlah nagari yang menerapkan tata kelola keuangan dan pemerintahan yang baik				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Persentase penugasan terkait pemerintahn umum yang dilaksanakan			30.000.000	Kec. Batang Kapas	
							Jumlah penetapan kawasan pedesaan yang di fasilitasi				Kec. Batang Kapas	
						Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				30.000.000	Kec. Batang Kapas	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Pemerintahan Desa Jumlah pengelolaan keuangan dan pemerintahan nagari yang baik		9 nagari	30.0000.000	Kec. Batang Kapas	



	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan kecamatan			90.000.000	Kec. Batang Kapas	
							Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				20.000.000	Kec. Batang Kapas	
							Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan				20.000.000	Kec Batang Kapas	
							Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				70.000.000	Kec. Batang Kapas	
							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha				5.000.000		
							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				5.000.000		
							Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan	Jumlah kunjungan safari ramadhan ke nagari		10 kali	60.000.000	Kec. Batang Kapas	



						Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Lembaga Didikan subuh yang dikunjungi	10 LDS		Kec. Batang Kapas	
							Jumlah MTQ yang diikuti	1 kali		Kec. Batang Kapas	
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat yang menjadi prioritas kecamatan		25.000.000	Kec. Batang Kapas	
						Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			25.000.000	Kec. Batang Kapas	
						Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah usulan program kegiatan pada musrenbang nagari sesuai dengan prioritas	50 usulan	25.000.000	Kec. Batang Kapas	
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			18.000.000		
						Kegiatan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			10.000.000		
						Sub Kegiatan Sinergitas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan			10.000.000		



Kantor Camat Batang Kapas

						Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				8.000.000		
						Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				8.000.000		
						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penugasan terkait pemerintahn umum yang dilaksanakan			26.000.000	Kec. Batang Kapas	
						Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				26.000.000	Kec. Batang Kapas	
						Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah pelaksanaan PHBN		1 kali	26.000.000	Kec. Batang Kapas	
JUMLAH										2.258.221.398		

BAB V

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja OPD Kecamatan Batang Kapas Tahun 2025 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Batang Kapas tahun 2021 – 2026. Rancangan Rencana Kerja OPD Kecamatan Batang Kapas Tahun 2025 akan dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Tahun 2025.

Rencana Kerja OPD Kecamatan Batang Kapas Tahun 2025 dimaksud untuk mengidentifikasi perkiraan sumber daya dan dana pembangunan. Rencana kerja OPD Kecamatan Batang Kapas Tahun 2025 diharapkan dapat mewujudkan reformasi birokrasi yang berkinerja tinggi. Untuk mengetahui efektifitas dan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan ini, akan diadakan evaluasi dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati Pesisir Selatan.

Batang Kapas, 29 Oktober 2025

CAMAT BATANG KAPAS



LEGIANDRU, S.STP

NIP.19921230 201406 1 001